

SALINAN



PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO

Nomor : Tahun 2023

Tanggal :

Tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN
(RPJMKal)
TAHUN 2022 - 2028**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
KALURAHAN TIRTOMULYO**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayat dari Allah SWT, akhirnya dokumen “ **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN 2022 – 2028**” dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatif, demokratis dan pemberdayaan menjadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen RPJMKal yang telah disusun ini sebagai dasar program kerja Lurah selama periode tahun 2022 – 2028 dan ini merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Lurah dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJMKal diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun Pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

RPJMKal Tahun 2022 – 2028 Kalurahan Tirtomulyo secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor

kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJMKal Tahun 2022 – 2028 Kalurahan Tirtomulyo ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJMKal ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama inidiharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

Tirtomulyo, 27 Januari 2023

Tim Penyusun RPJMKal

Mukhlison Afandi, S.Pd.I

SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KALURAHAN
Tirtomulyo tahun 2022 – 2028

Kata Pengantar	i
SISTEMATIKA RPJMDes	iii
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Pengertian.....	3
D. Maksud dan Tujuan	7
BAB II PROFIL KALURAHAN	9
A. Kondisi Umum Kalurahan	9
1. Sejarah Kalurahan.....	9
2. Demografi	10
3. Keadaan Sosial	13
4. Keadaan Ekonomi	14
B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan	
1. Pembagian wilayah Kalurahan	16
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan	17
3. Organisasi Lembaga kemasyarakatan Kalurahan	20
C. Potensi dan Masalah	27
1. Potensi.....	27
2. Masalah	31
3. Isu dan Masalah Utama.....	35
BAB III VISI dan MISI.....	36
A. Visi dan Misi	36
1. Visi	36
2. Misi.....	37
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN	40
1. Strategi Internal	40
2. Strategi Eksternal.....	41

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	43
1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan	43
2. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan.....	45
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN	47
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.....	47
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	47
3. Bidang Pembinaan Masyarakat	48
4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat.....	48
BAB VII PENUTUP	49
LAMPIRAN	
- Matriks RPJMDes	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) adalah aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di Kalurahan. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “ ikut merasa memiliki ” terhadap pembangunan di Kalurahannya. Selanjutnya masyarakat akan “ ikut bertanggung jawab ” terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan Kalurahan disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya.

Di dalam sudut pandang politik, Pemilihan Lurah merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan Kalurahan merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Calon Lurah pada saat berkampanye, menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan. Berkaitan dengan pembangunan Kalurahan maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Kalurahan, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya keterbatasan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Kalurahan itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal), belum tersusun lembaga sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangun sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, dan masih kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJMKal sangat penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Kalurahan 6 tahun ke depan. RPJMKal memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan dan mengacu pada RPJM Kabupaten Bantul. Proses penyusunan RPJMKal ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Kalurahan yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJMKal ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat Padukuhan dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJMKal. Sehingga diharapkan RPJMKal ini telah mencerminkan kondisi objektif Kalurahan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Rancangan RPJMKal disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BAMUSKAL dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2015 Tentang pedoman Peraturan Di Desa
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

C. Pengertian

1. Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Keadaan Mendesak Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut BAMUSKAL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
13. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.

14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKPKal, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
19. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Kalurahan adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kalurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kalurahan.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Kalurahan tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Lurah dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan selama masa jabatannya.

RPJM Kal, Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul 2022 – 2023 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJMKal diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan secara spesifik di Kalurahan Tirtomulyo. Dengan adanya RPJMKal, diharapkan dapat terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar pelaku, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

➤ **Tujuan**

Tujuan Penyusunan RPJMKal adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis Kalurahan mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kalurahan, Organisasi Kemasyarakatan Kalurahan, Masyarakat luas maupun berbagai pelaku pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan.
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan Kalurahan yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pelaku pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Kalurahan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN

A. Kondisi Umum Kalurahan

Pentingnya memahami kondisi Kalurahan untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat .

Kalurahan Tirtomulyo salah satu dari 5 Kalurahan yang ada di Kapanewon Kretek yang terletak kurang lebih 3 km ke arah Barat dari Kapanewon Kretek. Kalurahan Tirtomulyo mempunyai wilayah seluas : 418.730 ha dengan jumlah penduduk : 7019 dengan jumlah Kepala Keluarga : 2042 dengan Batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara	Kalurahan Sidomulyo
Sebelah Timur	Kalurahan Donotirto
Sebelah Selatan	Kalurahan Tirtosari
Sebelah Barat	Kalurahan Srigading, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Murtigading

Iklim Kalurahan Tirtomulyo sebagaimana Kalurahan - kalurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Kalurahan Tirtomulyo.

1. Sejarah Kalurahan

Adapun nama Kalurahan Tirtomulyo diambil dari kata Tirto dan Mulyo. Tirto artinya Air dan Mulyo artinya melimpah. Pada jaman dahulu sebelum terbentuknya Kalurahan Tirtomulyo masih termasuk Kelurahan. Sebelum terbentuk Kelurahan Tirtomulyo (Kelurahan gabungan), terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Karen, Kelurahan Bracan, Kelurahan Krajan dan Kelurahan Soropadan. Masing-masing Kelurahan mempunyai Lurah sendiri-sendiri. Lurah Karen yaitu Djodjo Pawiro, Lurah

Bracan yaitu Lurah Pawiro Atmojo, Lurah Krajan yaitu Lurah Djiko/Darmo Sanyoto, dan Lurah Soropadan yaitu Lurah Jowisno/Joyo Wisno. Tanggal 12 November 1947 empat Kalurahan tersebut bergabung menjadi satu Kalurahan dengan diberi nama Kelurahan Tirtomulyo. Dari kesepakatan Lurah 4 Kelurahan tersebut Kelurahan Tirtomulyo mengangkat Lurah pertama yaitu Sastro Midarso. Dengan adanya perubahan SOTK kabupaten Bantul Kelurahan Tirtomulyo menjadi Desa Tirtomulyo. Adapun Desa Tirtomulyo dibagi menjadi 15 (lima belas) Padukuhan, yaitu :

1. Padukuhan Plesan
2. Padukuhan Paliyan
3. Padukuhan Karen
4. Padukuhan Gondangan
5. Padukuhan Kergan
6. Padukuhan Bracan
7. Padukuhan Tokolan
8. Padukuhan Tluren
9. Padukuhan Gaten
10. Padukuhan Jebugan
11. Padukuhan Karangweru
12. Padukuhan Genting
13. Padukuhan Soropadan
14. Padukuhan Jetis
15. Padukuhan Punduhan

Pejabat Lurah Tirtomulyo semenjak berdirinya Kalurahan Tirtomulyo adalah sebagai Berikut :

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Sastro Midarso	Periode tahun 1947 s/d 1960	Lurah Pertama
2	R. Sucipto	Periode tahun 1961 s/d 1995	Lurah Kedua
3	Sukaca. HS	Periode tahun 1996 s/d 2004	Lurah Ketiga
4	Drs. Sujadi	Periode tahun 2005 s/d 2015	Lurah Keempat
5	Drs Sujadi	Periode tahun 2016 s/d 2022	Lurah keLima
6	Ridwan Anas	Periode tahun 2022 sampai sekarang	

2. Demografi

Kalurahan Tirtomulyo terdiri dari 15 Padukuhan dengan jumlah penduduk sebesar 7019 jiwa merupakan salah satu dari 5 Kalurahan di

Kapanewon Kretek. Batas Wilayah Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kalurahan Sidomulyo
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kalurahan Donotirto
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kalurahan Tirtosari
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kalurahan Srigading, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Murtigading

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 30 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 13 Km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kapanewon : 3 Km

Jumlah penduduk Kalurahan Tirtomulyo pada tahun 2022 mencapai 7019 jiwa terdiri dari Laki-Laki 3725 jiwa dan Perempuan 4027 jiwa dengan 2780 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Tirtomulyo dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Golongan Umur	Jumlah	Keterangan
0 Bln – 15Thn	536	
16 Bln – 65 Thn	4627	
66 Tahun keatas	2589	
Jumlah	7752	

Sumber Data : Profil Kelurahan Tahun 2022

b. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kalurahan Tirtomulyo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 7.640 Orang

- Kristen : 35 Orang
- Katolik : 70 Orang
- Hindu : 7 Orang
- Budha : - Orang

c. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kelurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Taman Kanak-kanak	205	
2	SD	1113	
3	SLTP	1065	
4	SLTA / SMK	1739	
5	Akademi/D1 – D3	161	
6	Sarjana S1	234	
7	Pasca Sarjana S2-S3	20	
JUMLAH		4537	

Sumber Data : Profil Kelurahan Tahun 2022

d. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Tirtomulyo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi

masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	2518	
2	Buruh Tani	2230	
3	Pedagang/wiraswasta	370	
4	Pegawai Negeri	285	
5	TNI/POLRI	65	
6	Pensiunan	138	
7	Peternak	7	
8	Pengrajin	5	
9	Jasa	18	
10	Tukang	225	
11	Pekerja Seni	25	
12	Lain-lain	1378	
13	Tidak Bekerja/Penganggur	302	

Sumber Data : Profil Kelurahan Tahun 2022

3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Kalurahan Tirtomulyo bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Tirtomulyo yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Tirtomulyo harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Kalurahan Tirtomulyo seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak,

Kelompok UMKM, dll merupakan potensi Kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Kalurahan pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	180	KK
2.	Jumlah penduduk miskin	395	KK
3.	Jumlah penduduk sedang	675	KK
4.	Jumlah penduduk kaya	1.453	KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	3.879 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	2.140 orang

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Gedung TK	4	1.	Poskesdes	1
2.	Gedung SLB	1	2.	Posyandu/Polides	15
3.	Gedung SD	2			
4.	Gedung SLTP	-			
5.	Gedung SLTA	1			

4. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Tirtomulyo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian.

Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Kalurahan yang dibukukan dalam APBKal setiap tahun anggaran. Sumber Pendapatan Kalurahan meliputi :

1. Sumber Pendapatan Kalurahan

- a. Dana Desa
- b. Alokasi Dana Desa
- c. Pendapatan asli Kalurahan terdiri dari hasil kekayaan Kalurahan, dan lain-lain pendapatan asli Kalurahan yang sah;
- d. Bagi hasil pajak daerah kabupaten dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap Kalurahan secara proporsional;
- e. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Kalurahan yang pembagiannya untuk setiap Kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- f. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Kalurahan;

3. Sumber Pendapatan Kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas Kalurahan
- b. Bangunan Kalurahan yang dikelola Kalurahan
- c. Lain-lain kekayaan milik Kalurahan

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kalurahan Tirtomulyo adalah petani, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang hidup dimasyarakat.

5. Prasarana dan Sarana Kalurahan

Pembangunan masyarakat Kalurahan diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan :

- Posyandu : 15 unit
- Poskesdes : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 4 unit
- SLB : 1 unit
- SD / MI : 2 unit
- SLTP / MTs : - unit
- SLTA / MA : 1 unit
- TPA / TPQ : 2 unit

3. Prasarana Umum lainnya

- Tempat ibadah : 22 unit
- Lapangan Olahraga : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan

mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kompetensi pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Wilayah Kalurahan Tirtomulyo dengan luas 418.730 ha. Kalurahan Tirtomulyo terdiri dari 15 Padukuhan, yaitu Padukuhan Plesan, Padukuhan Paliyan, Padukuhan Karen, Padukuhan Gondangan, Padukuhan Kergan, Padukuhan Bracan, Padukuhan Tokolan, Padukuhan Tluren, Padukuhan Gaten, Padukuhan Jebugan, Padukuhan Karangweru, Padukuhan Genting, Padukuhan Soropadan, Padukuhan Jetis, dan Padukuhan Punduhan. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Kalurahan Tirtomulyo terdiri dari Lurah, Carik, Kaur Danarta, Kaur Pangripta, Kaur Tata Laksana, Kasi

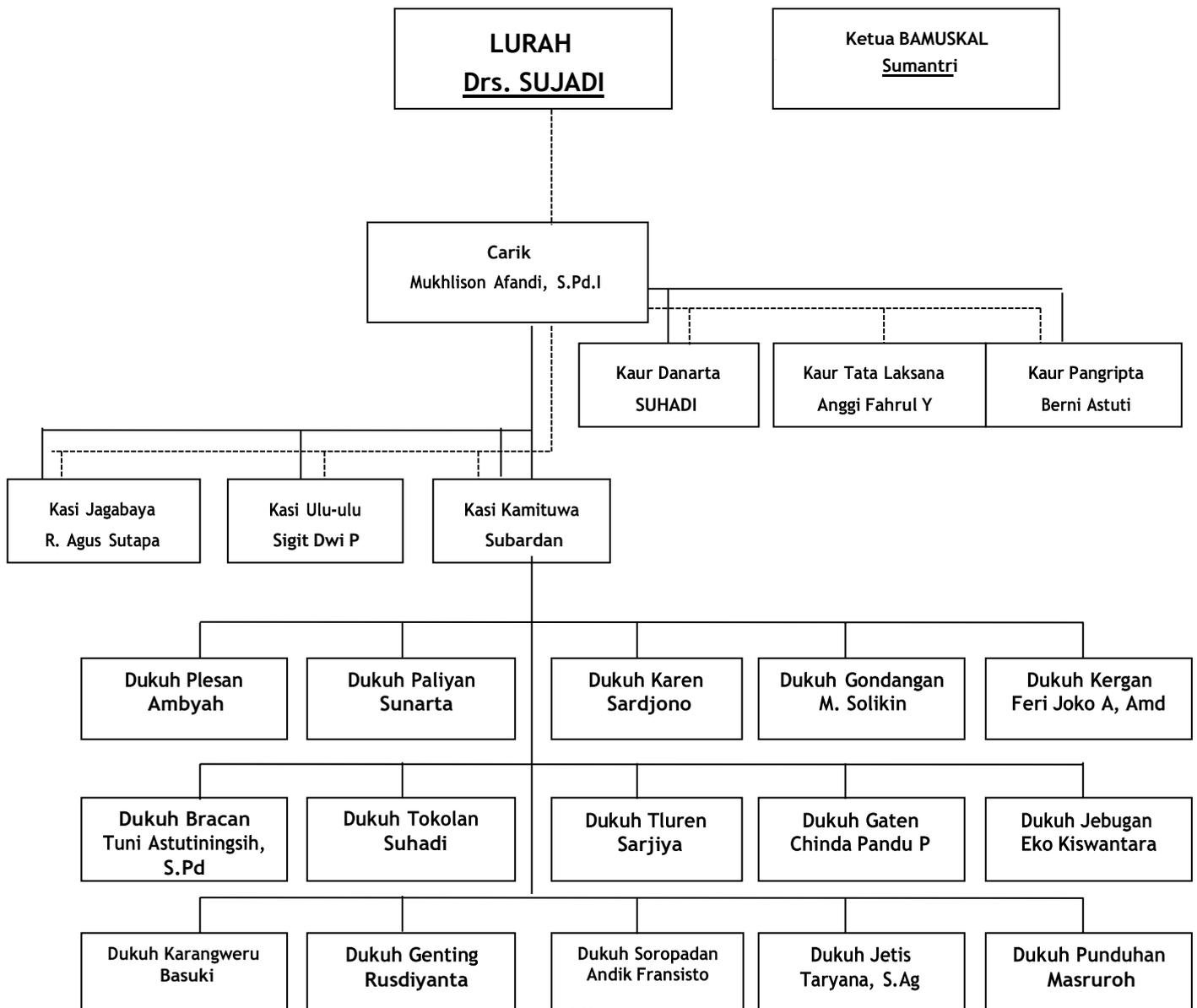
Jagabaya, Kasi Ulu-ulu, Kasi Kamituwa, dan 15 Dukuh. Kalurahan Tirtomulyo terdiri dari 66 Rukun Tangga (RT).

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan Kalurahan yang memiliki peranan dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan (pemerintahan Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang meliputi Sekretariat Kalurahan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Kalurahan bertugas membantu Lurah dalam bidang administratif Pemerintah Kalurahan yang dipimpin oleh Carik dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Danarta, urusan Pangripta dan urusan Tata Laksana. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Jagabaya, seksi Ulu-ulu, dan seksi Kamituwa. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 15 Padukuhan yang dipimpin oleh 15 Dukuh yaitu; Dukuh Plesan, Dukuh Paliyan, Dukuh Karen, Dukuh Gondangan, Dukuh Kergan, Dukuh Bracan, Dukuh Tokolan, Dukuh Tluren, Dukuh Gaten, Dukuh Jebugan, Dukuh karang Weru, Dukuh Genting, Dukuh Soropadan, Dukuh Jetis, Dukuh Punduhan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BAMUSKAL berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Anggota BAMUSKAL adalah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tirtomulyo



—— : Garis Komando

..... : Garis Koordinasi

Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Ridwan Anas	Lurah
2	Mukhlison Afandi, S.Pd.I	Carik
3	R. Agus Sutapa, SE	Kasi Jagabaya
4	Sigit Dwi Purwanto, ST	Kasi Ulu-ulu
5	Subardan	Kasi Kamituwa
6	Suhadi	Kaur Danarta
7	Anggi Fahrul Yunarta, S.Pd	Kaur Tata Laksana
8	Berni Astuti	Kaur Pangripta
9	Ambyah	Dukuh Plesan
10	Sunarto	Dukuh Paliyan
11	Kestri Yanto	Dukuh Karen
12	Muhammad Solikin	Dukuh Gondangan
13	Feri Joko Andriyanto, Amd. Kom	Dukuh Kergan
14	Yuni Astutiningsih, S.Pd	Dukuh Bracan
15	Suhadi	Dukuh Tokolan
16	Sarjiya	Dukuh Tluren
17	Chinda Pandu Permana, M.Pd	Dukuh Gaten
18	Eko Kiswanto	Dukuh Jebugan
19	Basuki	Dukuh Karangweru
20	Rusdiyanto	Dukuh Genting
21	Andik Fransisto	Dukuh Soropadan
22	Taryana, S.Ag	Dukuh Jetis
23	Masruroh	Dukuh Punduhan

Tabel :Nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Sumantri	Ketua

2	Agus Permadi	Wakil Ketua
3	Kasiyah	Sekretaris
4	Supriyadi	Ketua Bidang
5	Musriyati	Anggota
6	Maryadi	Ketua Bidang
7	Sugito	Anggota

3. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Kalurahan dan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Kalurahan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)

Tabel : Nama-nama LPMD Kalurahan Tirtomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Jumakir	Ketua
2	Sri Maryanto	Ketua II
3	Wagiyanto, S.Pd	Sekretaris I
4	Drs Purwanto, S.Pd	Sekretaris II
5	Sudarman	Bendahara I
6	Supriyadi	Bendahara II
7	Sardi	Seksi Prasarana Fisik
8	Tujo	
10	Supardiyono	Seksi Ekonomi
11	Suyanto	
12	Drs. Danu Suprpto	Seksi Sosial Budaya

13	Mc. Suharno	
14	Sihono	
15	Mujiyono	Seksi Agama
16	Y. Sukamdi	
17	Sunandar	Seksi Kepemudaan
18	Sugeng Narima, S.Pd	
19	Sukirmanto	Seksi Pendidikan dan Perpustakaan
20	Sri Maryanto	
21	Dra. Mustakimah	Seksi Peranan Wanita dan Persamaan Gender
22	Yuli Purwaningsih	
23	Sumardiyem	
24	Sarjono	Seksi Humas
25	Sujadiyono	

b. PKK

Tabel : Tim Penggerak PKK Desa Tirtomulyo

No	Nama	Jabatan
1	Ridwan Anas	Pembina
2	Endah	Ketua
3	Sri Yuni Rahayu	Wakil Ketua I
4	Sri Wuryani	Wakil Ketua II
5	Sumardiyem	Sekretaris I
6	Rukinem	Sekretaris II
7	Sri Mularsih	Bendahara I
8	Rini Yuliyanti	Bendahara II
9	Sutegawarti, S.Pd	Ketua Pokja I
10	Ariyanti	Sekretaris Anggota
11	Amirul Solikhah	
12	Jumlah	
13	Martinem	
14	Tri Yani Hasanah, S.Pd	

15	Wartini	
16	Hj. Sumarti	
17	Sri Siamasih	Ketua Pokja II
18	Nuryanti	Sekretaris
19	Budianingsih	Anggota
20	Elise Kusmiyati	
21	Pardiyah	
22	Sumarsih	
23	Istiqomah	
24	Nuryati	
25	Jumariyah	Ketua Pokja III
26	Daliyah	Sekretaris
27	Suci Lestari	Anggota
28	Maryani	
29	Kasiyah	
30	Musriyati	
31	Samilah	
32	Tumiyem	
33	Kartinah	Ketua Pokja IV
34	Masruroh	Sekretaris
35	Endah Dwi Lestari, S.Si.Apt	Anggota
36	Sri Ambarwati	
37	Parjinah	
38	Tutik supriyati	
39	Rujiyem	
40	Sri sukarti	
41	Berni Astuti	

c. Karang Taruna Kalurahan

Tabel : Karang Taruna Kalurahan

No	Nama	Jabatan
1	Ridwan Anas	Pelindung
2	Subardan	Pembina
3	Cahyo Purwandi	Ketua
4	Marwan	Wakil Ketua
5	Hendri	Sekretaris I
6	Karlina	Sekretaris II
7	Al Arifin	Bendahara I
8	Erika	Bendahara II
9	Purnomo	Seksi Pendidikan dan latihan
10	Yuli Sutanto	
12	Huda	
13	Andri	
14	Winarno	
15	Nova Yamtini	
16	Asep Zan Parwita	Seksi Agama
17	Tri Heri Makmuri	
18	Winarno	
19	Achmad	
20	Aris Wibowo	
21	Dewi Rachmawati	
22	R. Kurniantoro	Seksi Seni dan Budaya
23	Erick	
24	Cahyo	
25	Fajar	
26	Dasto	
27	Feri Asmika	Seksi Olahraga dan Kesehatan
28	Dwi Ari pamuji	
29	Miftahuddin	
30	Rinung Anton Sugito	
31	Angga	

32	Sukis	Seksi Ekonomi Produktif
33	Giyono	
34	Apriko Setiawan	
35	Adit	
36	Alfi Hermawan	
37	Rendra Widodo	
38	Widodo	
39	Kisdi Suwarta	
40	Nunung Hidayat	
41	Yuliantoro	
42	Rivan	
43	Maryanto	
44	Danang	
45	Yunan Yunarko	

d. Rukun Tetangga (RT)

No	Padukuhan	Nama	Jabatan
1	Plesan	SUMADI	Ketua RT 01
2		SUPRIHATIN, SH	Ketua RT 02
3		MUJIYO	Ketua RT 03
4		ROHMADI	Ketua RT 04
5	Paliyan	KASIYO	Ketua RT 01
6		RIYANTO	Ketua RT 02
7		PRIYO SUTRISNO	Ketua RT 03
8		JONO LUKITO	Ketua RT 04
9	Karen	BASIRAN	Ketua RT 01
10		KISDIRAHARJO	Ketua RT 02
11		GUNAWAN	Ketua RT 03
12		SARJONO	Ketua RT 04
13		PITAYA	Ketua RT 05

14		UNTUNG WIDODO	Ketua RT 06
15	Gondangan	SUMARNO	Ketua RT 01
16		MARYONO	Ketua RT 02
17		SUDARMAN	Ketua RT 03
18		ACHMADI	Ketua RT 04
19	Kergan	DAMARDI	Ketua RT 01
20		MUJI KARYONO	Ketua RT 02
21		KISMODIHARJO	Ketua RT 03
22		TUWUH WIYONO	Ketua RT 04
23	Bracan	MARYOTO	Ketua RT 01
24		PURNAMA	Ketua RT 02
25		AHMAD JUWENI	Ketua RT 03
26		SRI MARWANTO, SPd.	Ketua RT 04
27	Tokolan	SUPARDIYONO	Ketua RT 01
28		SRI MARYANTO, SPd	Ketua RT 02
29		ISMUNARDI, SPd.	Ketua RT 03
30		KUSRIYADI	Ketua RT 04
31	Tluren	SUGITO	Ketua RT 01
32		SARJIYONO	Ketua RT 02
33		SUMARYANTO	Ketua RT 03
34		SIHONO	Ketua RT 04
35	Gaten	WAJIDI	Ketua RT 01
36		WAHYUDIYANTO	Ketua RT 02
37		TRI SUDARMADI	Ketua RT 03
38		MUHBIYANTO	Ketua RT 04
39	Jebugan	V. BUNTORO	Ketua RT 01
40		SUKIJO, SH	Ketua RT 02
41		TUMIJO	Ketua RT 03
42		ACHMAD DJUMALI	Ketua RT 04
43	Karang Weru	MARYONO	Ketua RT 01
44		SUKAMTO, Amd	Ketua RT 02

45		SARTONO	Ketua RT 03
46		PARJIMAN	Ketua RT 04
47		SUTIMAN	Ketua RT 05
48	Genting	Mc. Suharno	Ketua RT 01
49		Y. SUKAMDI	Ketua RT 02
50		MUJONO	Ketua RT 03
51		SADARI	Ketua RT 04
52		SUBAGYO	Ketua RT 05
53		MARTUJO	Ketua RT 06
54	Soropadan	SUPRIYONO	Ketua RT 01
55		SUKARJO	Ketua RT 02
56		TUGIMAN	Ketua RT 03
57		ARI PURWOKO	Ketua RT 04
58		JUMAKIR	Ketua RT 05
59	Jetis	NURYANTO	Ketua RT 01
60		SUKISNO	Ketua RT 02
61		NGADIYANTA	Ketua RT 03
62		KUPON	Ketua RT 04
63	Punduhan	TUMIJO	Ketua RT 01
64		SUKARTO	Ketua RT 02
65		KRISTADI	Ketua RT 03
66		MARYADI	Ketua RT 04

e. POKGIAT LPMD

No	Nama	Pokgiat Padukuhan
1	Partono	Plesan
2	Sugeng Narimo	Paliyan
3	Suharjito	Karen
4	Heru Santosa	Gondangan

5	Kamidjo	Kergan
6	Sukaca. HS	Bracan
7	Suwono	Tokolan
8	Jumakir	Tluren
9	Sujiman	Gaten
10	Mujiyono	Jebugan
11	Sardi	Karangweru
12	Ridwan Anas	Genting
13	Sunandar, S.Pd	Soropadan
14	H. Temu Wiyadi, S.Pd	Jetis
15	M. Yudha Ari Wibowo	Punduhan

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat Kalurahan untuk membangun Kalurahannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah Kalurahan, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur Kalurahan dalam mengelola Kalurahan. Hal itu jelas membuat pemerintah Kalurahan menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan Kalurahan dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan Kalurahan. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat Kalurahan dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka peran partisipasi masyarakat Kalurahan untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi 'kosmetik' untuk sekedar memenuhi kuota adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat Kalurahan dalam proses pembangunan di Kalurahan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat Kalurahan.

C. Potensi dan Masalah

1. Potensi

Kalurahan Tirtomulyo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum secara optimal dapat diberdayakan.

a. Sumber Daya Alam

Kalurahan : Tirtomulyo

Kapanewon : Kretek

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan persawahan	258.165	Ha
2	Sumber air	3	Sumber
3	Tanah Pekarangan/Pemukiman	151.130	Ha
4	Sungai	4980	M
5	Perkuburan	2,5	Ha

b. Sumber Daya Manusia

Kalurahan : Tirtomulyo

Kapanewon : Kretek

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga		

	a. Jumlah penduduk laki-laki	3725	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	4027	Orang
	c. Jumlah keluarga	2780	KK
2	Mata Pencaharian utama penduduk		
	Petani	2518	Orang
	Buruh Tani	2230	Orang
	Pedagang/wiraswasta	370	Orang
	Pegawai Negeri	285	Orang
	TNI/POLRI	65	Orang
	Pensiunan	138	Orang
	Peternak	7	Orang
	Pengrajin	5	Orang
	Jasa	18	Orang
	Tukang	225	Orang
	Pekerja Seni	25	Orang
	Lain-lain	1378	Orang
	Tidak Bekerja/Penganggur	302	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	254	Orang
	b. Lulusan D1,D2,D3	161	Orang
	c. Lulusan SLTA	1739	Orang
	d. Lulusan SMP	1065	Orang
	e. Lulusan SD	1113	Orang

Sebagian wilayah Kalurahan Tirtomulyo mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam menjadi wilayah Kalurahan wisata yaitu Kampung Gurami. Kampung Gurami merupakan aset Kalurahan yang potensial dalam bidang pemberdayaan Masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Padukuhan Kergan.

Selain Kalurahan Wisata di Tirtomulyo juga berkembang usaha kecil mandiri. Diantaranya di Padukuhan Gondangan telah berdiri Pengolahan Air Kelapa menjadi Nata De Coco. Di Padukuhan Tluren pengolahan Nira Kelapa menjadi Gula Semut telah berkembang pesat. Di Padukuhan Genting sebagai sentra Produksi Adrem, di Padukuhan Bracan Sentra produksi Apem. Dan masih banyak lagi usaha mikro kecil mandiri yang berpotensi untuk pengentasan kemiskinan warga masyarakat Kalurahan Tirtomulyo. Semua Usaha masyarakat yang ada di wilayah Kalurahan Tirtomulyo menjadi aset Kalurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Kelembagaan / Organisasi

Kalurahan : Tirtomulyo

Kapanewon : Kretek

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan	Keterangan
1.	BPD	1	Lembaga	
2.	LPMKal	1	Lembaga	
3.	PKK	1	Lembaga	
4.	Karang Taruna	1	Lembaga	
5.	Rukun Tetangga (RT)	66	RT	
6	POKGIAT LPMKal	15	Kelompok	
7	Kelompok Tani	15	Kelompok	
8	Kelompok Ternak	15	Kelompok	
9	Kelompok Perikanan	16	Kelompok	
10	UMKM	186	Unit	
11	Lain-lain			

d. Potensi Prasarana dan Sarana

Kalurahan : Tirtomuylo

Kapanewon : Kretek

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	10.800	M
	b. Jembatan	2	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	4	Unit
	b. Gedung TK	4	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	2	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	15	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	--	Unit
	d. Sarana Air Bersih/PAMSIMAS	1	Unit
	e. IPAL KOMUNAL	2	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Kalurahan	-	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	-
	c. Kios Kalurahan	6	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	23	Kel
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	15	Kel
	c. Usaha Kecil Mandiri	185	orang
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	--	Ha
	b. Total pinjaman di masyarakat	--	/Tahun

e. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Kalurahan : Tirtomulyo

Kapanewon : Kretek

Kabupaten : Bantul

Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	Gotong royong	425	Orang
2.	Adat istiadat	2	Orang
3.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	--	Orang
4.	Kesenian Jatilan/Reog	1	Kel
5.	Kelompok Jami'yah Kalurahan	25	Kel
6.	Peringatan Hari Besar Nasional	3	Keg
7.	Peringatan hari Besar Agama	3	Keg
8.	Kelompok Tani Kalurahan	15	Kel

2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini diperoleh dari hasil penggalian gagasan di tingkat Padukuhan dan musdes penyusunan RPJM Kalurahan Tirtomulyo yang menghadirkan perwakilan Padukuhan yang kompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan, sehingga kekelengkapan dan keakuratan data dapat dipertanggung jawabkan.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya permasalahan maka diupayakan reduksi data, sehingga permasalahan yang ada penting dan aktual.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret Kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Tabel : Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan peralatan dan administrasi Kalurahan perlu adanya : Kelengkapan Peralatan Kantor/peralatan rumah tangga Kalurahan, Kelengkapan Peralatan dan Operasional Administrasi Kalurahan 2. Batas Kalurahan dan banyaknya Padukuhan di Kalurahan Tirtomulyo perlu adanya penetapan dan penegasan batas Kalurahan /Padukuhan; yaitu : gapuro batas Kalurahan /Padukuhan, 3. Perkembangan penduduk yang ada di Kalurahan Tirtomulyo, status kepemilikan tanah yang belum tersurat perlu adanya Pendataan Kalurahan: profil Kalurahan, Data penduduk, Monografi Kalurahan, Fasilitasi Akte Kelahiran dan kematian, Pensektifikatan Tanah secara masal (prona) 4. Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan; yaitu : Musrenbangkal, Muskal, Musduk 5. Pengelolaan informasi Kalurahan; yaitu : Pengelolaan SID, sketsa Kalurahan, peta Kalurahan, kalender Musim, Baliho 6. Penyelenggaraan perencanaan Kalurahan; yaitu : RPJMKal , RPKKal, APBKal 7. Penyelenggaraan dan evaluasi tingkat perkembangan pembangunan pemerintahan Kalurahan; yaitu : LPPK, Laporan APBKal & LRA 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan; yaitu : Sarpras DAN LKD, BUMKALMA 9. Profesionalitas kerja Pelayanan Masyarakat yang masih kurang efektif dan efisien perlu adanya Peningkatan Administrasi Kalurahan : Kelengkapan Operasional Perkantoran, Peningkatan Pelayanan Masyarakat, SK lembaga Kalurahan (LPMK, PKK, Pokgiat LPMK, RT, Karangtaruna), Kelengkapan Administrasi RT dan peralatan RT, pembuatan Program sistem Informasi Kalurahan untuk pelayanan Masyarakat, pengadaan Mesin Absensi Vinger Print, 10. Peningkatan Keamanan : Poskamling, gardu

		<p>Ronda, Alat Pemadam Kebakaran, Pembinaan LINMAS, Pemasangan Kamera CCTV di Kantor Kalurahan</p> <p>11. Peringatan hari Jadi Kalurahan ; Penyelenggaraan Hari jadi Kalurahan, Lomba RT, Lomba Padukuhan, Ekspo Kalurahan, Gelar Budaya</p> <p>12. Peningkatan Wawasan Kebangsaan : penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela Negara</p>
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<p>1. Banyak lokasi yang sering banjir, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kalurahan, yaitu : Pembuatan jembatan, pembangunan jalan (Cor Blok, Aspal), drainase, Saluran Irigasi , Pembangunan dan Perbaikan Pintu air, TPA (Sampah), Gorong-gorong, penerangan jalan, Rambu-rambu lalu Lintas, Meteran dan Instalasi Listrik bagi KK Miskin, Peninggian Bangket,</p> <p>2. Penataan Tata Ruang Kalurahan dan Bangunan kantor Kalurahan yang sudah lama perlu adanya Pembangunan dan rehab sarana dan prasarana kantor Kalurahan; yaitu : Rehap Kantor Kalurahan dan bangunan Pendukung lainnya, pembangunan ruang hijau Kalurahan (Taman Kalurahan), Pengadaan Genset, Soundsistem, dll</p> <p>3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Polindes, Posyandu (Timbangan, Alat tensi), Alat Ukur (Diabetes, Kolesterol, Asam Urat), Jambanisasi(MCK), Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Lantenisasi, MCK Komunal</p> <p>4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penunjang Pengembangan Ekonomi Produktif : Pembangunan gedung BUMKal, Pembangunan Kios Kalurahan, Pembangunan WILKEL,</p> <p>5. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, TPQ, TPA</p> <p>6. Pembangunan Tata Lingkungan peningkatan Kebersihan dan kesehatan masyarakat : pembangunan Kandang kelompok, Sanitasi, IPAL komunal, MCK Komunal, Peresapan Air Hujan, Pembangunan PAMSIMAS</p> <p>7. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : penghijauan, pemanfaatan Lahan Pekarangan</p>

		<p>8. Pengembangan Infrastruktur Padukuhan : Pembangunan Balai Padukuhan, pembangunan Pagar Makam, Pengadaan Peralatan Perawatan Jenazah, Papan Nama (Dukuh RT), papan Pengumuman, Papan Koran, Pembangunan Kamar Kereta Jenazah, Balai makam, Pembangunan Tiang Bendera dan Tugu Projo Taman Sari, Papan Nama Jalan/Gang, Sumur Makam, Pembangunan Menara Masjid, Pengadaan Sound System Padukuhan, Pengadaan Genset, Pengadaan Tratak, Taman Padukuhan</p> <p>9. Peningkatan Peribadahan Masyarakat : rehap Masjid, pembangunan Bangunan Pendukung Masjid</p> <p>10. Penggantian Lahan/Sawah kas yang digunakan untuk fasilitas pendidikan/umum</p>
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat : Pembinaan POSYANDU BALITA dan LANSIA, PHBS, PSN, Senam Lansia, Senam Kesehatan Jasmani, Gebyar Senam Sehat, Hatinya PKK, Penyuluhan Bahaya NAPSA, Deklarasi Stop BABS, Pengadaan Ambulan Desa, STBM</p> <p>2. Pembinaan Pendidikan ; pembinaan Guru PAUD, Pembinaan Guru TK, Honor Guru Paud dan TK</p> <p>3. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT, BAMUSKAL, LPMK, PKK, Pokgiat LPMK, Karang taruna</p> <p>4. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan Kesejahteraan masyarakat; yaitu : siskamling, pembinaan keluarga Sejahtera, Jagawarga</p> <p>5. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : PHBA, Pembinaan kaum Rois dan Pengadaan Alat Pengurusan jenazah (Kereta Jenazah), penyuluhan Masuknya Aliran sesat</p> <p>6. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : lapangan olahraga dan bangunan pendukung lapangan Kalurahan</p> <p>7. Pembinaan lembaga adat; yaitu : Merti Dusun, Wiwitan</p> <p>8. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pengadaan gamelan kelompok Karawitan, sragam kesenian (kelompok Ketoprak, Kelompok Karawitan, Kelompok Reog,</p>

		<p>Kelompok Gejok Lesung, Kelompok Moco Pat, dll)</p> <p>9. Peningkatan Kapasitas SDM : Out Bond, Kunjungan Karang taruna, Pembinaan kerja ke Luar Negeri,</p>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>Program peningkatan kesejahteraan masyarakat, Yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, UMKM, Pelatihan Kerajinan barang bekas, Kopwan dan Puap, Pelatihan memasak KWT/PKK, Pelatihan BUMDes, Pelatihan Pembuatan Tempe/Emping Melinjo, Pelatihan pembuatan telur Asin, pelatihan pembuatan Tahu/Tempe, 2. Peningkatan kapasitas/Ketrampilan masyarakat; yaitu : Pelatihan Montir, Pelatihan Bengkel (Las, AC, DII), Pelatihan menjahit, pelatihan Tukang, pelatihan Batik, Pelatihan Memasak 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, : <ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi Produktif : Modal BUMDes, Bantuan Modal UMKM, KUBE, - Pertanian : Sumur Bor Lahan Pertanian, Pengadaan Sarana Pertanian(Mesin tanam Padi, Mesin Tanam jagung, Mesin panen Padi, Mesin, Tleser, Alat Semprot, Disel Air, dll) pelatihan pembuatan pupuk Organik - Peternakan ; Pembangunan Kandang Kelompok, pelatihan pembuatan Pakan Ternak - Perikanan : pembangunan dan Rehap Kolam Kelompok, Pelatihan Pembuatan pakan 4. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : Bang Sampah, Pemanfaatan Lahan Pekarangan, BIOGAS, 5. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagiLurah, perangkat Kalurahan, dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan; yaitu : Bimtek Pamong Kalurahan, Sosialisasi peyelenggaraan Pemkal, Kunjungan Kerja, Perpustakaan D Kalurahan, 6. Pelatihan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pelatihan karawitan, pelatihan MC Bahasa Jawa, pleatihan Sinoman,

		Pelatihan Mocopat 7. Peningkatan Gotong Royong Masyarakat ; Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong, 8. Banyaknya kelompok-kelompok yang belum berbadan hukum; Fasilitasi legalitas kelompok
5	Bidang Mendesak Kalurahan	

3. Isu/ masalah Utama

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dideskripsikan permasalahan berikut prioritas penanggulangan masalah serta potensi unggulan beserta rencana pengembangannya. Untuk mengetahui secara detail mengenai potensi dan masalah yang ada di Lingkungan Kalurahan dapat ***dilihat dalam lampiran.***

Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam proses pengkajian keadaan Kalurahan. Selanjutnya potensi dan permasalahan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo selama 6 (enam) tahun kedepan.

BAB III

VISI Dan MISI

A. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Tirtomulyo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Tirtomulyo adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pembangunan Kawasan Kalurahan Tirtomulyo berbasis Pertanian, Wisata, Budaya dan Potensi Lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Tirtomulyo Maju, Sejahtera dan Agamis"

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakikat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan

penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Tirtomulyo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Tirtomulyo sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Kalurahan yang baik (Good Governance).
2. Pengembangan dan Peningkatan Perekonomian Kalurahan.
3. Percepatan pembangunan dalam sektor Infrastruktur dasar Kalurahan.
4. Membangun dan menumbuhkembangkan potensi budaya berbasis pada kearifan lokal.
5. Pengembangan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pemberdayaan Karang Taruna.
6. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
7. Mewujudkan dan meningkatkan Kegiatan Keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun Visi dan Misi Kalurahan dijabarkan melalui Arah kebijakan Kalurahan yang menjadi sekala Prioritas sekala Kalurahan menurut 5 Bidang pembangunan di Kalurahan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Arah kebijakan Kalurahan merupakan penjabaran kegiatan dari Visi dan Misi Lurah Tirtomulyo, yakni :

1. Pengembangan dan Peningkatan tata kelola Pemerintah Kalurahan yang baik (Good Governance).

Arah Kebijakan :

- a. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintahkalurahan dapat berjalan secara cepat, tepat, dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan Pamong dan Lembaga yang ada dengan mengedepankan Manajemen Pemerintah dan Pelayanan Publik.
- b. Penguatan dan peningkatan Kinerja Pamong Kalurahan sesuai dengan TUPOKSI nya.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pamong Kalurahan.
- d. Peningkatan kualitas Pelayanan terhadap masyarakat dengan prinsip Transparansi (keterbukaan) dan Akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan).
- e. Pengelolaan dan peningkatan sistim informasi Manajemen Penyelenggaraan perekonomian petani.

2. Pengembangan dan Peningkatan Perekonomian Kalurahan

Arah Kebijakan :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian.
- b. Optimalisasi pengelolaan tanah milik kalurahan untuk meningkatkan perekonomian petani.
- c. Optimalisasi kelembagaan perekonomian kalurahan (BUMDES, GAPOKTAN, KUBE).
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UMKM, wiraswasta, petani dan peternak.
- e. Mendorong dan mengembangkan pembudidayaan ikan air tawar sebagai program unggulan di Kalurahan Tirtomulyo.
- f. Mendorong dan mengembangkan wisata kampung Gurame sebagai penopang kesejahteraan masyarakat Tirtomulyo.

3. Percepatan Pembangunan dalam sektor Infrastruktur dasar kalurahan.

Arah Kebijakan :

- a. Pembangunan dan rehabilitasi jalan penghubung antar padukuhan
- b. Pembangunan dan pengembangan jalan gang padukuhan.
- c. Pembangunan dan pengembangan jalan irigasi.
- d. Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kalurahan.
- e. Pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase pemukiman.
- f. Pembangunan dan pengembangan kios kalurahan.
- g. Melanjutkan pembangunan taman kuliner kalurahan.
- h. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II, pusat dan bapak ibu anggota dewan untuk menunjang pembangunan infrastruktur.
- i. Melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dan mengembangkan partisipasi masyarakat.

4. Membangun dan menumbuhkembangkan potensi budaya berbasisan pada kearifan lokal.

Arah Kebijakan :

- a. Inventaris potensi budaya yang ada di Kalurahan Tirtomulyo.
- b. Penguatan dan peningkatan kelembagaan kesenian tradisional masyarakat.
- c. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kebudayaan dan pendidikan masyarakat.
- d. Penguatan dan pelestarian adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan aqidah.

5. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pemberdayaan Karang Taruna.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat Kalurahan Tirtomulyo dengan menyediakan Pusat kegiatan belajar masyarakat.
- b. Pengembangan dan peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Pengembangan dan peningkatan TPA/TPQ.
- d. Pemberian Beasiswa pada siswa berprestasi dan tidak mampu pada pendidikan formal dan informal.
- e. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang

kegiatan PAUD dan TPA/TPQ.

- f. Penyediaan Perpustakaan di Kalurahan berbasis Digital.
- g. Memberdayakan Karang Taruna di bidang olahraga, seni budaya, dan Kewirausahaan.

6. Pengembangan dan peningkatan kualitas Kesehatan Masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Optimalisasi peran dan fungsi kader yandu.
- b. Optimalisasi program kalurahan siaga.
- c. Optimalisasi program PAMSIMAS.
- d. Pembangunan dan rehabilitasi saran dan prasarana penunjang kegiatan kesehatan masyarakat.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana database kesehatan masyarakat.
- f. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang lainnya.

7. Mewujudkan dan meningkatkan Kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Arah Kebijakan :

- a. Mendorong dan mengadakan Pembinaan Majelis Taqlim.
- b. Pembinaan kerukunan antar umat beragama.
- c. Mengadakan peringatan Hari besar keagamaan.
- d. Mengadakan pengajian rutin untuk Pamong Kalurahan, Bamuskal, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Tirtomulyo.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Kalurahan Tirtomulyo dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan Kalurahan dirumuskan menuruturutan pemerintahan dengan mengkaitkan pada Visi dan misi pembangunan Kalurahanyang akan dilaksanakan selama tahun 2022-2023, yaitu Terwujudnya Pembangunan Kawasan Kalurahan Tirtomulyo berbasis Pertanian, Wisata, Budaya dan Potensi Lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Tirtomulyo Maju, Sejahtera dan Agamis. Penjabaran dari visi dan Misi pemerintah Kalurahan Tirtomulyo tersebut dituangkan dalam program pembangunan Kalurahan selama enam tahun kedepan dan terbagi menjadi 5 (bidang) bidang yakni :

1. Bidang Pemerintahan

Program Pembangunan bidang pemerintahan meliputi :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintahan Kalurahan
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan
- e. Sub Bidang Pertanian

2. Bidang Pembangunan

Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

- a. Sub Bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
- c. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- d. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- e. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
- f. Sub Bidang Pariwisata

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Program Pembangunan bidang Pembinaan meliputi :

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program Pembangunan bidang Pemberdayaan meliputi :

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat DAN MENDESAK DESA

Program Pembangunan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa meliputi :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak

Dari Program pembangunan diatas diharapkan selama enam tahun kedepan dapat terlaksana. Dan penjabaran program pembangunan tersebut dapat dilihat dalam lampiran parameter kegiatan pembangunan (terlampir).

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipatif.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam tahap perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang mengetahui kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan umum Kalurahan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJM Kalurahan Tirtomulyo ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tahun 2022 -2028 yang selanjutnya pada setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPKal.

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2022 sd. 2028

DESA : Tirtomulyo
KECAMATAN : Kretek
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : DIY

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data existin g Tahun Ke -0	Target Tahun ke 1-6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiran an Volum e & Satuan	Perkiraan Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan Swakelola/Ke rja Sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak ke Tiga		
	Bidang	Kode	Nama Program/ Kegiatan			Th ke- 1	Th ke- 2	Th ke- 3	Th ke- 4	Th ke- 5	Th ke- 6			Jumlah (Rp)	Sumber			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>u</i>	<i>v</i>	<i>w</i>		
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintahan Kalurahan	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah									Kal. Tirtomulyo			APBKal			
			a. Penghasilan Tetap Lurah		1	√	√	√	√	√	√		1					
			b. Tunjangan Lurah		1	√	√	√	√	√	√		1					
													-					
		2	Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Pamong Kalurahan										Kal. Tirtomulyo	-		APBKal		
			a. Penghasilan Pamong (Penghasilan tetap Carik, Kasi /Kaur, Dukuh)		22	√	√	√	√	√	√		22					
			b. Tunjangan Pamong (Tunjangan tetap carik, Kasi/Kaur, Dukuh)		22	√	√	√	√	√	√		22					
													-					
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Pamong					√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	-		APBKal	
														-				
4	Penyediaan Oprasional Pemerintah Kalurahan (Belanja ATK, Honor PKPKD, dll)			1	√	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal			
												-						
5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal											Kal. Tirtomulyo	-		APBKal			
	a. Penyediaan Tunjangan			7	√	√	√	√	√	√	√		7					
												-						

		12	Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan		31	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	31		APBKal	
													-			
		13	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan		8	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	8		APBKal	
													-			
		14	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror		2	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	2		APBKal	
													-			
2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan		1							Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
													-			
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Perkantoran		1	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
													-			
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana kantor Desa		1	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
													-			
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Penyusunan/Pendataan dan Pemutakiran Profil Desa		1							Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
			a. Penyusunan Profil Desa			√	√	√	√	√	√		-			
			b. Pendataan SDGs			√	√	√	√	√	√		-			
			c. Pembuatan Profil Dusun			√	√	√	√	√	√		-			
													-			
		2	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		1	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
													-			
		3	Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa Secara partisipasif		1	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
													-			
		4	Pendataan Potensi Budaya Kalurahan			√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	-		APBKal	
													-			
		5	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Padukuhan		15	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	15		APBKal	
													-			
		6	Penyusunan/Pendataan dan Pemutakiran Data Monografi Desa		1	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
													-			

4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	1								Kal. Tirtomulyo	1		APBKal		
		a. Pelaksanaan Muskal			√	√	√	√	√	√				-			
		b. Pelaksanaan Musrenbang			√	√	√	√	√	√				-			
														-			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1									Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
		a. Musdus Jaring Aspirasi Bamuskal			√	√	√	√	√	√				-			
		b. Musdus PPBMP			√	√	√	√	√	√				-			
														-			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMKal/RKPKal,dll)	1									Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
		a. Penyusunan Perubahan RKP			√	√	√	√	√	√				-			
		b. Penyusunan RKP Regular			√	√	√	√	√	√				-			
		c. Penyusunan RPJMKal 2023 - 2028			√					√				-			
														-			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ,dll)	1									Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
		a. Penyusunan Perubahan APBKal			√	√	√	√	√	√				-			
		b. Penyusunan APBKal Tahun Berjalan			√	√	√	√	√	√				-			
		c. Penyusunan LPJ APBKal			√	√	√	√	√	√				-			
														-			
		5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	√	√	√	√	√	√			Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
														-			
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perkades selain Perencanaan Keuangan)	1	√	√	√	√	√	√			Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
														-			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1									Kal. Tirtomulyo	1		APBKal	
a. Penyusunan LKPPD			√	√	√	√	√	√				-					
b. Penyusunan LPPD			√	√	√	√	√	√				-					
												-					

8	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)		1	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal
	- Pembelian alat penunjang SID (Drone, Kamera, tripod Stabiliser)				√	√	√						
											-		
9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa		1							Kal. Tirtomulyo	1		APBKal
	a. Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan			√	√	√	√	√	√			-	
											-		
10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Wilyah dan Bamuskal									Kal. Tirtomulyo	-		
	a. Pelaksanaan Pemilihan Lurah		1						√		1		APBD II
	b. Pemilihan Bamuskal		7	√							7		APBKal
											-		
11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen Lomba (Lomba Desa)		1	√					√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal
											-		
12	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror			√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	-		APBKal
	Pengisian Pamong										-		
	a. Kasi Jogoboyo (R. Agus Sutapa)		1						√		1		
	b.. Kaur Danarto (Suhadi)		1						√		1		
	c. Dukuh Tluren & Karangweru		2	√							2		
	d. Dukuh Plesan		1		√						1		
	e. Dukuh Paliyan		1			√					1		
	f. Pengisian Staf Honoror		4		√		√				4		
											-		
13	Penerbitan Lembaran Kalurahan/Berita Kalurahan			√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	-		APBKal
											-		
5	Sub Bidang Pertanahan												
	1 Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa		1	√	√	√	√	√	√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal
											-		
	2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		1			√			√	Kal. Tirtomulyo	1		APBKal

	j. Coorblok RT 04 100m					√					Gondangan				
	Kergan														
	a. Corblok (bu jayeng ke selatan) RT 03				√						Kergan				
	b. Aspal Jal Dusun Kergan			√											
	d. Paving Blok Jl Dusun Kergan RT 02					√									
	Bracan														
	a. Paving Blok (lanjutan) RT 04				√						Bracan				
	b. Coorblok RT 03					√					Bracan				
	c. Coorblok RT 04						√				Bracan				
	d. Aspal Jalan Bracan-Kergan 450m					√					Bracan				
	e. Corblok Penghubung RT 01-04							√			Bracan				
	f. Coorblok RT 02 (sukaca-tohari)							√			Bracan				
	g. Coorblok RT 02 (Tugi-Utara mushola)								√		Bracan				
	i. Pengerasan Jalan							√			Bracan				
	j. Coorblok Jalan RT 01					√					Bracan				
	k. Aspal Jalan Bracan - Gaten							√			Bracan				
	l. Cor blok jl Inpeksi Sisi Kanan Gondangan - Bracan														
	l. Cor blok jl Inpeksi Sisi Kiri							√							
	m. Peninggian Bangket Pijenen Kiri Gondangan Bracan								√						
	Tokolan														
	a. Aspal Jalan Tluren-Tokolan-Bracan					√					Tokolan				
	b. Coorblok jalan RT02-03							√			Tokolan				
	c. Coorblok jalan bulak sawah								√		Tokolan				
	d. Aspal Jalan Tokolan - Tluren				√						Tokolan				
	e. Paving Blok Jalan RT 02						√				Tokolan				
	Tluren														
	a. Cor Blok RT 01 (selatan Pak Sujiyo) 150 m				√						Tluren				
	b. Pengerasan jalan RT 02 200 m					√					Tluren				
	c. Coorblok jalan RT 04 (utara pak samsu) 150m						√				Tluren				

	d. Corblok soropadan-dadapan 300m										Soropadan				
	Jetis														
	a. Coorblok embong barat jetis 100m										Jetis				
	b. Coorblok jalan embong timur jetis RT 04 200m										Jetis				
	d. Coorblok jalan RT 04 300 m										Jetis				
	Punduhan														
	a. Coorblok jalan Punduhan - Jetis										Punduhan				
	b. Coorblok jalan Punduhan RT 01 Embong										Punduhan				
	c. Coorblok jalan pemakaman umum RT 03										Punduhan				
	e. Coorblok jalan utara pak yanto - makam RT 03 dan RT 04										Punduhan				
	f. Cor Blok Jalan Punduhan - Ngentak - Blado										Punduhan				
	- Cor Blok Jalan Inpeksi Merten Karangweru														
	- Cor Blok Jalan inpeksi Pijenan kiri Karen karangweru														
	- Cor Blok Karen Paliyan				√										
	- Cor Blok Genting Bangkrungan				√										
	- Aspal jalan Genting Bangkrungan					√									
	- Cor Blok Jalan Pertanian Soropadan Blado														
	- Aspal Jalan Karangweru Karen				√										
	- Cor Blok Jl Inpeksi Karen Paliyan														
3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani														
3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik														
	a. Perbaikan Jembatan dusun gaten										Gaten				
	b. Rehab Jembatan Karen (SLB)										Karen				
	c. jembatan Bracan										Bracan				

	b. Rehab bangket dan talang air dr RT 02, 03, dan 04										Genting				
	c. Pembuatan saluran irigasi timur genting										Genting				
	d. Rehab bangket dan talang air RT 01										Genting				
	e. Bangket irigasi RT 02										Genting				
	f. Peninggian bangket RT 04,06										Genting				
	Soropadan														
	a. Bangket embong timur dan barat soropadan										Soropadan				
	b. Bangket utara soropadan										Soropadan				
	c. Pembuatan gejluk irigasi										Soropadan				
	Jetis														
	a. Bangket gorong-gorong barat dusun jetis										Jetis				
	Punduhan														
	a. Bangket jalan RT 03										Punduhan				
	b. Bangket jalan RT 01 (300m)										Punduhan				
	c. Bangket Afour blado										Punduhan				
	d. Bangket Saluran Irigasi (barat Masjid)										Punduhan				
	e. Pembangunan Drainase Punduhan RT 01										Punduhan				
3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai														
	a. Pembangunan Gedung Pertemuan / Balai Dusun Soropadan										Soropadan				
3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan														
	a. Rehab Makam RT 01 & RT 03														
	b. Rehab Pagar Makam (Gaten, Karen)										Gaten, Karen				

	- Pembinaan Kelompok Kesenian Musik Aqustik padukuhan Tokolan													
	- Pembinaan Kelompok Kesenian padukuhan Tluren (Campur Sari "Cinde Laras", Jathilan Taronggo Mudho)													
	- Pembinaan Kelompok Kesenian padukuhan Gaten													
	- Pembinaan Kelompok Kesenian Tari (anak-anak dan Remaja) Karangweru													
	- Fasilitasi Kelompok Kesenian hadroh Genting													
	- Pembinaan Kelompok Kesenian Hadroh padukuhan Soropadan													
	- Pembinaan Kelompok Kesenian Tuklikan & Gedruk padukuhan jetis													
	- Pembinaan Kelompok Kesenian Ketoprak padukuhan Punduhan "Sekar Arum Budaya"													
	- Pembinaan Kelompok Kesenian Hadroh (Punduhan)													
2.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan													
	a. Karawitan Rini Budaya													
2.3	Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Hari Raya, Hari Besar Agama)													
	a. Bantuan Operasional HUT RI tingkat Dusun			√	√	√	√	√	√					
	- Pengadaan Umbul-umbul / Bendera merah putih 15				√									
	b. Pelaksanaan Pengajian tingkat Kalurahan & Dusun			√	√	√	√	√	√					
	c. Peringatan HUT RI			√	√	√	√	√	√					
	d. Peringatan Hari Jadi Bantul			√	√	√	√	√	√					

Mengetahui
BAMUSKAL Tirtomulyo

Lurah Tirtomulyo

Tirtomulyo,..... 2023
Disusun Oleh
Tim Penyusun

Sumantri

Ridwan Anas

Mukhlison Afandi, S.Pd.I

Salinan sesuai dengan aslinya
Ani Sarik Tirtomulyo
Kepala Urusan Pangripta,

BERI ASTUTI